

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Jumat, 5 Maret 2021



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media online dan media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Kompas.com	Jumat, 5 Maret 2021	Padat Karya Tunai Rp 7,465 Triliun Dikucurkan untuk Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga mengalokasikan anggaran Rp 7,465 triliun untuk program Padat Karya Tunai (PKT) Tahun Anggaran 2021. Program PKT yang dilaksanakan Ditjen Bina Marga terbagi menjadi beberapa jenis yaitu PKT Rutin, PKT Revitalisasi Drainase, PKT Non Rutin, PKT Jalan Tol serta PKT Tambahan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). https://www.kompas.com/properti/read/2021/03/04/150000521/padat-karya-tunai-rp-7-465-triliun-dikucurkan-untuk-pemeliharaan-jalan.
2	Detik.com	Jumat, 5 Maret 2021	Diresmikan Jokowi Bendungan Sindangheula Pengendali Banjir Di Serang	Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Sindangheula di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Kamis (4/3/2021). Dalam meresmikan bendungan ini, Jokowi didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk Novel Arsyad. https://www.kompas.com/properti/read/2021/03/04/185001521/bendungan-sindangheula-bakal-jadi-destinasi-wisata-baru-di-banten. https://finance.detik.com/infrastruktur/d-5480989/diresmikan-jokowi-bendungan-sindangheula-pengendali-banjir-di-serang?_ga=2.68909913.977969302.1614880111-551869630.1614880111 https://www.antaranews.com/berita/2026584/presiden-bendungan-sindang-heula-bisa-jadi-pembangkit-listrik
3	Kompas.com	Jumat, 5 Maret 2021	Pemprov DKI Persilakan Kementerian PUPR Mulai Normalisasi Sungai di Lahan yang Sudah Dibebaskan	Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Dudi Gardesi mempersilahkan Kementerian PUPR untuk memulai normalisasi sungai di wilayah yang sudah dilakukan pembebasan lahan. Sehingga Kementerian PUPR tidak perlu menahan normalisasi di lahan yang sudah dibebaskan. https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/04/20114571/pemprov-dki-persilakan-kementerian-pupr-mulai-normalisasi-sungai-di-lahan.

4	Bisnis.com	Jumat, 5 Maret 2021	Kementerian PUPR Siapkan Aturan Mengenai Infrastruktur Tahan Gempa	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara internal tengah mengembangkan instrumen kelembagaan dalam bentuk peraturan menteri terkait infrastruktur tahan gempa untuk implementasi yang lebih teknis pada pemerintah pusat dan daerah. https://ekonomi.bisnis.com/read/20210304/45/1364079/pupr-siapkan-aturan-mengenai-infrastruktur-tahan-gempa.
5	Okezone.com	Jumat, 5 Maret 2021	PUPR Dorong Pendanaan Asing untuk Penambahan Sambungan Air Minum	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan berusaha mendatangkan pendanaan dari luar negeri untuk mencapai target penambahan sambungan air minum untuk 10 juta unit. https://ekonomi.bisnis.com/read/20210304/45/1363946/pupr-dorong-pendanaan-asing-untuk-penambahan-sambungan-air-minum. https://www.wartaekonomi.co.id/read330647/bangun-10-juta-sambungan-air-minum-kementerian-pupr-colek-investor-asing https://economy.okezone.com/read/2021/03/04/320/2372441/bangun-10-juta-sambungan-air-minum-kementerian-pupr-butuh-rp108-triliun
6	Bisnis.com	Jumat, 5 Maret 2021	Tingkat Pengembalian Investasi Proyek Air Minum Capai 2 Digit	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa investasi dalam proyek penyediaan air minum sangat menarik. Pasalnya, rata-rata angka internal rate of return proyek sistem penyediaan air minum mencapai dua digit. https://ekonomi.bisnis.com/read/20210304/45/1363955/tingkat-pengembalian-investasi-proyek-air-minum-capai-2-digit.
7	Antaranews.com	Jumat, 5 Maret 2021	KemenPUPR upayakan infrastruktur miliki sisi strategis mitigasi banjir	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengupayakan setiap infrastruktur yang dibangun memiliki sisi strategis dalam mitigasi bencana, hal itu dilakukan untuk menjaga kesediaan air baku pada musim kemarau dan membantu manajemen debit air yang berlebihan pada musim penghujan. https://www.antaranews.com/berita/2027262/kemenpupr-upayakan-infrastruktur-miliki-sisi-strategis-mitigasi-banjir

8	Beritasatu.com	Jumat, 5 Maret 2021	Kempupera Dorong Bank BTN Fokus di Segmen Rumah Subsidi	Staf Khusus Bidang Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), Iskandar Saleh, mengatakan, perumahan merupakan salah satu program strategis yang dilaksanakan pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi seluruh masyarakat. https://www.beritasatu.com/ekonomi/741403/kempupera-dorong-bank-btn-fokus-di-segmen-rumah-subsidi
---	----------------	---------------------	---	---

Judul	Rp 23 Triliun Dana PKT Memutar Ekonomi	Tanggal	5 Maret 2021
Media	Media Indonesia (Halaman, 2)		
Resume	Sekitar 1,23 juta warga di seluruh Indonesia akan dipekerjakan di sejumlah proyek padat karya tunai (PKT/cash for work) infrastruktur. Proyek yang menelan anggaran jumbo Rp23,24 triliun itu mengutamakan pekerjaan seperti pembangunan jalan dan jembatan di bawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera).		

Rp23 Triliun Dana PKT Memutar Ekonomi

Setiap kelurahan yang menerima program ini mendapatkan dana Rp300 juta untuk pekerjaan proyek fisik dan tenaga kerja.

INRI NANTIKA JULITA
inri@mediaindonesia.com

SEKITAR 1,23 juta warga di seluruh Indonesia akan dipekerjakan di sejumlah proyek padat karya tunai (PKT/cash for work) infrastruktur. Proyek yang menelan anggaran jumbo Rp23,24 triliun itu mengutamakan pekerjaan seperti pembangunan jalan dan jembatan di bawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera).

"Infrastruktur skala kecil, pekerjaan sederhana, dan tidak membutuhkan teknologi yang melibatkan warga setempat. Selain mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli, PKT juga mendistribusikan dana hingga ke desa atau pemok," kata Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Dijèn Bina Marga mengalokasikan dana Rp7,4 triliun untuk program PKT yang direncanakan menyerap 15.225.029 hari orang kerja (HOK). HOK ialah satuan tenaga kerja yang biasa digunakan dalam menghitung analisis usaha. Pada umumnya HOK berjumlah 8 jam per hari yang sudah termasuk 1 jam istirahat.

Untuk PKT bidang jalan dan jembatan hingga awal Maret 2021 telah menyerap 714.268 HOK. Pekerjaan padat karya itu dilakukan di seluruh Balat Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Balat Pelaksanaan Jalan Nasional Dijèn Bina Marga yang mencakup penempatan ruas jalan nasional.

PKT Dijèn Bina Marga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu PKT rutin, PKT revitalisasi drainase, PKT nonrutin, PKT tol, serta PKT tambahan. Untuk PKT rutin, yaitu pemeliharaan jalan senilai Rp1,05 triliun digunakan untuk pemeliharaan median jalan dan pengecatan marka.

Selain jalan juga dilakukan pemeliharaan rutin jembatan yang menggunakan skema swadaya masyarakat dengan anggaran Rp460 miliar seperti untuk pengecatan rangka jembatan.

Adapun program PKT revitalisasi drainase jalan menelan dana Rp1,5 triliun. Pembangunan drainase di ruas

jalan nasional amat mendesak mengingat sifat aspal yang mudah rusak setelah hujan dan banjir.

Rp300 juta

Dalam menanggapi PKT di sektor infrastruktur, Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati mengakui pandemi covid-19 telah mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat.

"Banyak orang kehilangan pekerjaan. Warga yang turut serta dalam program ini nanti mendapatkan upah. Uang yang mereka terima itu diharapkan bisa menggerakkan perekonomian keluarga," ujar Eti kemarin.

Untuk PKT bidang jalan dan jembatan hingga awal Maret 2021 telah menyerap 714.268 HOK.

Sebanyak tujuh kelurahan di Kota Cirebon mendapatkan program PKT yang melibatkan warga sekitar. Ke-7 kelurahan tersebut, yaitu Kelurahan Sukapura, Kelurahan Kajaksan, Kelurahan Pegambiran, Kelurahan Drajat, Kelurahan Argasunya, Kelurahan Harjamukti, dan Kelurahan Kalijaga.

"Saya juga sudah menekankan agar tenaga kerja berasal dari warga setempat sehingga tidak menimbulkan gejala," lanjut Eti.

Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon, Wadi, menjelaskan kegiatan ini berbasis masyarakat.

"Masyarakat diberikan secara bergiliran karena bertujuan untuk menyjahterakan mereka yang mengalami dampak pandemi. Jangan pakai orang dari luar," tutur Wadi.

Setiap kelurahan yang mendapatkan program ini akan menerima dana sekitar Rp300 juta yang digunakan untuk pekerjaan proyek fisik dan tenaga kerja. Warga yang mengikuti proyek fisik ini juga menerima upah. Dari upah tersebut diharapkan perekonomian warga terdampak covid-19 terbantu. (UI/X-3)

Program Padat Karya Tunai (PKT)

- Dilakukan Kementerian PU-Pera.
- Salah satu solusi ekonomi krisis.



Anggaran dan Target Penyerapan Tenaga Kerja 2021

Rp23,24 triliun.

- Menyerap 1,23 juta tenaga kerja.

Target Pelaksanaan

- Infrastruktur berskala kecil.
- Pembangunan yang melibatkan masyarakat.



Rencana PKT yang Dilakukan Ditjen Bina Marga

- PKT rutin
- PKT revitalisasi drainase
- PKT nonrutin
- PKT jalan tol
- PKT tambahan untuk pemulihan ekonomi

Tingkat Pengangguran Melonjak akibat Pandemi (Data BPS Agustus 2020)

Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja

- Pengangguran: **2,56 juta**
- Bukan angkatan kerja: **0,76 juta**
- Bekerja dengan pengurangan jam kerja: **24,03 juta**
- Sementara tidak bekerja: **1,77 juta**



Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional

- Agustus 2018: 7,07 juta (5,03%)
- Agustus 2019: 7,10 juta (5,23%)
- Agustus 2020: 9,77 juta (7,07%)

Sumber: Kementerian PU-Pera/BPS/Libang MI/ Grafis: SENO

Judul	Berita Foto Peresmian Bendungan Sindang Heula	Tanggal	5 Maret 2021
Media	Kompas, Halaman 11		
Resume	Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Sindangheula di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Kamis (4/3/2021). Dalam meresmikan bendungan ini, Jokowi didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.		

Presiden Resmikan Bendungan Sindang Heula



Presiden Joko Widodo (kanan) saat meresmikan Bendungan Sindang Heula, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (4/3/2021).

Judul	Angin Segar Berupa Insentif Untuk Sektor Properti Mendorong Keyakinan Pengembang	Tanggal	5 Maret 2021
Media	Kompas, Halaman 13		
Resume	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menegaskan, insentif ini diharapkan menjadi momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional di bidang properti, terutama mendorong penjualan pasokan rumah yang telah dibangun pengembang pada tahun 2020 dan 2021. Selain itu, juga membantu masyarakat memperoleh rumah layak huni yang sudah ada di pasar perumahan melalui pembebasan PPN.		

Angin Segar dengan Catatan

Angin segar berupa insentif untuk sektor properti mendorong keyakinan pengembang. Bahkan muncul kalimat: inilah saatnya berinvestasi rumah! Namun, ada beberapa catatan terkait insentif itu.

Stefanus Osa Triyatna



bangun sampai selesai pada Agustus. Namun, jika penjualan terjadi pada Mei atau setelah itu, pengembang diperkirakan tidak akan sanggup menyelesaikan rumah pada jendela pemberian insentif.

"Pengembang tidak akan mengambil risiko membangun banyak unit dalam kondisi saat ini sebelum ada pembeli. Karena itu kebijakan ini hanya menguntungkan pengembang yang kini memiliki rumah *ready stock* dan (insentif ini) tak dapat mengangkat potensi daya beli masyarakat lain yang ingin membeli properti secara inden," ujar Ali.

Menurut Ali, kebijakan yang seharusnya luar biasa ini menjadi kontraproduktif karena ada aturan *ready stock*. Fokus pemerintah seharusnya memperbesar pasar, bukan hanya untuk menghabiskan stok rumah. Paling tidak, ada patokan standar progres bangunan sampai batas akhir periode relaksasi.

Ada baiknya kebijakan ini juga diperlebar jangkauannya untuk pengembang menengah dan kecil yang saat ini kemungkinan tidak berani membangun *ready stock* karena pendanaan yang terbatas. IPW memandang, jika dimungkinkan, pemerintah dapat memberikan standar minimal dari progres yang terbangun sampai masa periode kebijakan berakhir Agustus 2021. Artinya, unit hunian tak harus siap huni, tetapi ada persyaratan minimum lain.

"Untuk menjangkau pengembang menengah dan kecil yang juga tak memiliki *ready stock* tetapi pasarnya besar, ada baiknya pemerintah menerapkan batasan minimum progres hunian sampai batas waktu berakhir. Paling tidak, misalnya, harus ada fondasi atau naik dinding sehingga tidak harus siap huni 100 persen," ujar Ali.

Enam bulan, tenggat waktu yang teramat singkat. Seperti juga sektor otomotif yang mendapat relaksasi pajak bertahap selama sembilan bulan, sektor properti juga berpacu dengan waktu untuk mengejar kebangkitan kembali.

Insentif uang muka nol persen menjadi salah satu angin segar. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif berupa penghapusan PPN rumah. Itu semua bertujuan mendorong gerak perekonomian yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (1/3/2021), menyatakan, insentif PPN diberikan untuk mendorong konsumsi dan produksi perumahan di sektor properti. Pemberian insentif PPN atas penyerahan rumah tapak ataupun rumah susun ditanggung pemerintah selama enam bulan untuk masa pajak 1 Maret-31 Agustus 2021.

Pemberian insentif itu menggunakan mekanisme PPN yang ditanggung pemerintah (DTP) dengan besaran 100 persen dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar. Untuk harga rumah tapak atau rumah susun di atas Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar, insentifnya ditetapkan 50 persen dari PPN.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menegaskan, insentif ini diharapkan menjadi momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional di bidang properti, terutama mendorong penjualan pasokan rumah yang telah dibangun pengembang pada tahun 2020 dan 2021. Selain itu, juga membantu masyarakat memperoleh rumah layak huni yang sudah ada di pasar perumahan melalui pembebasan PPN.

Kriteria rumah tapak atau

rumah susun yang mendapat fasilitas ini adalah penyerahan secara fisiknya dilakukan pada saat pemberian insentif (Maret-Agustus 2021), rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni, dan diberikan maksimal untuk satu rumah tapak dan atau rumah susun untuk satu orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka satu tahun.

Pengembang properti sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah itu. Tentunya di balik kebijakan ini, tantangan yang tidak ringan harus dihadapi pengembang.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya mengatakan, "Kebijakan pemerintah ini menunjukkan apresiasi terhadap pengembang properti. Itu artinya kami benar-benar diposisikan setara dengan industri-industri lain untuk memajukan ekonomi yang sedang terpuruk."

Berdasarkan data Kementerian Keuangan dalam "Overview Kebijakan Perumahan Indonesia", potensi penyerapan tenaga kerja untuk pembangunan 500.000 rumah subsidi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) mencapai 3 juta orang, kemudian satu apartemen menyerap 300 orang, dan sektor penjualan/pengelolaan menyerap 1.500 orang.

Di sektor properti lainnya, pembangunan satu pusat perbelanjaan berpotensi menyerap 1.000 tenaga kerja, dan untuk pengelolaannya menyerap 15.000 orang. Sementara itu proses pembangunan hotel bintang tiga menyerap 300 orang dan untuk pengelolaannya me-

nyerap 250 orang.

Direktur Pemasaran PT Ciputra Residence Yance Onggo mengatakan, banyak aspek yang dapat membuat bisnis properti bergairah dalam mendorong perekonomian nasional. Apabila pelaksanaan kebijakan ini bagus, diharapkan dapat ditingkatkan kembali levelnya terkait kriteria yang berurusan dengan insentif tersebut. Dengan demikian, sektor konstruksi sebagai penopang industri properti dapat berkontribusi lebih besar lagi.

Tantangan menghadang

Meski demikian, sejumlah pihak memberikan catatan pada pemberian insentif pemerintah ini. Menurut Bambang, di satu sisi, pemerintah ingin menggerakkan roda perekonomian melalui sektor properti. Namun, di sisi lain, pengerakan itu akan kurang berdampak signifikan karena pemerintah menekankan kriteria penjualan rumah *ready stock*. "Sebetulnya, ini malah akan mengerem penjualan rumah inden," katanya.

Pengamat properti Ali Tranggahanda dari Indonesia Property Watch (IPW) mengatakan, keputusan uang di sektor properti tidak dapat dianggap enteng, bahkan mungkin lebih tinggi dibandingkan sektor otomotif, apalagi jika dihitung sampai pada industri ikutanannya. Menurut dia, sektor properti tidak sepenuhnya kehilangan daya beli di segmen tertentu pada masa pandemi.

Berdasarkan riset IPW, penjualan sepanjang tahun 2020 menurun 31,8 persen dibandingkan tahun 2019. Namun, jika sedikit dirinci, kenaikan

Kawasan perumahan di Cakung, Jakarta Timur, Rabu (3/3/2021). Insentif uang muka nol persen diharapkan menggerakkan sektor properti (atas). Kompleks perumahan yang sedang dibangun di Cileeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (29/11/2020) (tengah). Pembangunan rumah di kompleks perumahan baru di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/2/2021) (bawah).

penjualan tahun 2020 pada segmen harga Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar tumbuh 12,5 persen. Sementara, segmen lainnya mengalami penurunan bervariasi.

Kebijakan penghapusan PPN tersebut telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2021. Aturan relaksasi ini hanya berlaku untuk rumah yang terbangun siap huni sampai batas waktu 31 Agustus 2021. Artinya, kata Ali, rumah harus *ready stock* atau diupayakan terbangun sampai periode insentif PPN berakhir.

"Inilah esensinya para pengembang yang mempunyai unit *ready stock* meningkatkan penjualan dengan relaksasi luar biasa. Termasuk proyek-proyek apartemen yang saat ini masih tersedia banyak stok karena secara harga jual pasti akan lebih rendah dari biasanya," kata Ali.

Tantangan lainnya, pembangunan rumah baru harus dapat diselesaikan selama 6 bulan. Jika ada unit yang terjual pada Maret, misalnya, pengembang harus segera mem-